

**MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
**INSPEKTORAT**

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	<p>Pengelolaan Sumber Daya Manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum memiliki kombinasi keahlian dan jenjang jabatan auditor yang diperlukan</li> <li>- belum memiliki sistem pengembangan karir dengan membandingkan kinerja auditor dengan kinerja yang diharapkan.</li> </ul> <p>Struktur Tata Kelola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya aturan mengenai pengawasan terhadap Unit Inspektorat oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja APIP</li> </ul>	<p>Membuat dan mengembangkan sistem pengembangan karir/pola karir auditor.</p> <p>Membuat mekanisme/prosedur/ aturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Inspektorat LKPP oleh jajaran pimpinan di lingkungan LKPP</p>	<p>Skor Kapabilitas APIP 2019 mencapai level 3</p>	<p>Penyusunan SOP Pengawasan Internal (Area Penguatan Tata Laksana):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat</li> <li>2. SOP Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Jasa Lainnya di Inspektorat</li> <li>3. SOP Pengembangan Karir dan Kompetensi Auditor</li> <li>4. SOP Pengajuan Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor</li> <li>5. SOP Pemeliharaan Kualitas Pengawasan Inspektorat serta Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penjaminan Kualitas</li> </ol>	<p>A. Mempertahankan elemen-elemen kapabilitas APIP pada level 3, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan layanan</li> <li>2. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja</li> <li>3. Budaya dan hubungan organisasi</li> </ol> <p>B. Meningkatkan elemen-elemen kapabilitas APIP dari level 2 ke level 3, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Praktik Profesional</li> <li>3. Struktur Tata Kelola</li> </ol>	Maret-Juni	Inspektur	1	Penyusunan Surat Tugas Kapabilitas APIP LKPP	Maret	Surat Tugas
								2	Penyusunan 5 SOP oleh tim Inspektorat	Maret	Draft SOP
								3	Mengundang BPOT untuk pembahasan draf SOP yang telah disusun tim	Maret	Notulen rapat (perbaikan draft SOP)
								4	Penyampaian SOP ke BPOT	April	Nota Dinas
								5	Penyusunan Laporan Kapabilitas APIP (atas penyusunan SOP)	April	Laporan
								6	Penomoran SOP oleh BPOT	Juni	SOP
2	<p>1. Praktek Profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terlaksananya dan terpeliharanya kegiatan program Quality Assurance dan perbaikannya.</li> </ul> <p>2. Belum ditetapkan secara formal atas draft pedoman/ kebijakan pengelolaan risiko di lingkungan LKPP</p>	<p>1. menyusun keputusan Kepala LKPP terkait dengan pedoman telaahan rekan sejawat</p> <p>2. penetapan pedoman kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perka Kode Etik Auditor LKPP</li> <li>- Perka Pengelolaan Risiko LKPP</li> <li>- Kepka Pengelolaan Gratifikasi</li> <li>- Kepka Pengelolaan Benturan Kepentingan</li> <li>- Kepka Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>- Kepka Evaluasi Terpisah</li> <li>- Kepka Uraian Jabatan Pegawai Inspektorat</li> </ul>	<p>Skor Kapabilitas APIP tahun 2019 mencapai level 3 sesuai target dalam RPJM 2015-2019, dari semula 3 Dengan Catatan (17 Desember 2018).</p>	<p>Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Internal (Area Penguatan Perundang-undangan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perka Kode Etik Auditor LKPP</li> <li>2. Perka Pengelolaan Risiko LKPP</li> <li>3. Kepka Pengelolaan Gratifikasi</li> <li>4. Kepka Pengelolaan Benturan Kepentingan</li> <li>5. Kepka Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>6. Kepka Evaluasi Terpisah</li> <li>7. Kepka Uraian Jabatan Pegawai Inspektorat</li> <li>8. Kepka Kelas Jabatan Auditor LKPP</li> </ol>	<p>Peningkatan Skor Kapabilitas APIP LKPP dari 3 Dengan Catatan (17 Desember 2018) menjadi 3 (tahun 2019) melalui upaya:</p> <p>A. Mempertahankan elemen-elemen Kapabilitas APIP pada level 3, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan layanan</li> <li>2. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja</li> <li>3. Budaya dan hubungan organisasi</li> </ol> <p>B. Meningkatkan elemen-elemen kapabilitas APIP dari level 2 ke level 3, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Praktik Profesional</li> <li>3. Struktur Tata Kelola</li> </ol> <p>C. Tersusunnya kebijakan yang menjadi payung hukum atas pelaksanaan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, Whistleblowing System Internal dan Kegiatan Pengawasan Internal lainnya</p>	Januari-Desember	Inspektur	1	Penyusunan draft Kepka dan Perka LKPP	Januari	Draft Kepka dan Perka: 1. Perka Kode Etik Auditor LKPP 2. Perka Pengelolaan Risiko LKPP 3. Kepka Pengelolaan Gratifikasi 4. Kepka Pengelolaan Benturan Kepentingan 5. Kepka Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 6. Kepka Evaluasi Terpisah 7. Kepka Uraian Jabatan Pegawai Inspektorat 8. Kepka Kelas Jabatan Auditor LKPP
								2	Penyampaian draft Kepka dan Perka LKPP ke HSIK	Januari	Nota Dinas No 19/Ins/01/2019
								3	Penyampaian kembali draft Kepka dan Perka LKPP dari HSIK ke Inspektorat	Februari	Nota Dinas NO 1319/ Ses.3/4/2019
								4	Pembahasan draft Kepka dan Perka LKPP antara Inspektorat dan Biro Hukum	Maret-oktober	Perbaikan draft Kepka dan Perka (Notulen Rapat)
								5	Finalisasi Kepka dan Perka LKPP	November	Kepka dan Perka LKPP
								6	Penomoran Kepka dan Perka LKPP oleh Biro Hukum	Desember	Kepka dan Perka LKPP
3	<p>Belum adanya metodologi penghitungan SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat, yaitu observasi dan kuesioner lanjutan</p>	<p>tersusunnya tools untuk melakukan penilaian maturitas oleh Inspektorat sesuai Perka BPKP No.4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>	<p>Tingkat Maturitas SPIP di lingkungan LKPP sesuai target dalam RPJM 2015-2019, yakni level 3</p>	<p>Pembinaan SPIP di LKPP ( Area Penguatan Pengawasan)</p>	<p>Peningkatan nilai Maturitas SPIP di LKPP dari 3.053 (18 Desember 2018) menjadi 3,52 (tahun 2019)</p>	Maret	Inspektur	1	Penyusunan Surat Tugas Tim Penilaian Maturitas SPIP LKPP Tahun 2019	Maret	Surat Tugas No 35/Ins/03/2019
								2	Entry Meeting Penilaian Maturitas SPIP dengan seluruh UKE II di LKPP	Maret	Notulen rapat (kesepakatan pengisian kuesioner lanjutan dan wawancara)
								3	Pelaksanaan pengisian kuesioner lanjutan dan wawancara	Maret	Kuesioner dan hasil wawancara
								4	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Maret	Laporan SPIP

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
4	Belum adanya mekanisme monitoring atas evaluasi WBS	Dokumentasi pelaksanaan WBS LKPP secara berkala	4 laporan WBS	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan WBS ( Area Penguatan Pengawasan)	Penyusunan Laporan WBS LKPP	Januari- Desember	Inspektur	1	Penyusunan Laporan WBS	April	Laporan WBS (TW I)
								2	Penyusunan Laporan WBS	Juli	Laporan WBS (TW II)
								3	Penyusunan Laporan WBS	Oktober	Laporan WBS (TW III)
								4	Penyusunan Laporan WBS	Januari	Laporan WBS (TW IV)
5	Belum adanya mekanisme monitoring atas pelaksanaan Gratifikasi	Dokumentasi pelaksanaan Gratifikasi LKPP secara berkala	4 Laporan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Gratifikasi ( Area Penguatan Pengawasan)	Penyusunan Laporan Gratifikasi	Januari- Desember	Inspektur	1	Penyusunan Laporan Gratifikasi	April	Laporan Gratifikasi (TW I)
								2	Penyusunan Laporan Gratifikasi	Juli	Laporan Gratifikasi (TW II)
								3	Penyusunan Laporan Gratifikasi	Oktober	Laporan Gratifikasi (TW III)
								4	Penyusunan Laporan Gratifikasi	Januari	Laporan Gratifikasi (TW IV)
6	Belum adanya mekanisme monitoring atas pelaksanaan Benturan Kepentingan	Dokumentasi pelaksanaan Benturan Kepentingan LKPP	Laporan Benturan Kepentingan	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan (Area Penguatan Pengawasan)	Penyusunan Laporan Benturan Kepentingan	Januari- Desember	Inspektur	1	Penyusunan Laporan Benturan Kepentingan	April	Laporan Benturan Kepentingan (TW I)
								2	Penyusunan Laporan Benturan Kepentingan	Juli	Laporan Benturan Kepentingan (TW II)
								3	Penyusunan Laporan Benturan Kepentingan	Oktober	Laporan Benturan Kepentingan (TW III)
								4	Penyusunan Laporan Benturan Kepentingan	Januari	Laporan Benturan Kepentingan (TW IV)
7	Belum adanya mekanisme monitoring atas pelaksanaan Pengaduan Masyarakat	Dokumentasi pelaksanaan Pengaduan Masyarakat LKPP secara berkala	Laporan Pengaduan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Pengaduan Masyarakat (Area Penguatan Pengawasan)	Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat	Januari- Desember	Inspektur	1	Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat	April	Laporan Pengaduan Masyarakat (TW I)
								2	Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat	Juli	Laporan Pengaduan Masyarakat (TW II)
								3	Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat	Oktober	Laporan Pengaduan Masyarakat (TW III)
								4	Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat	Januari	Laporan Pengaduan Masyarakat (TW IV)
8	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Internal Inspektorat	terlaksananya proses implementasi seluruh aplikasi internal Inspektorat	Dapat digunakannya secara maksimal aplikasi-aplikasi internal Inspektorat, antara lain: 1. Sistem Informasi Pemantauan Hasil Pengawasan	Pengembangan Teknologi Informasi dalam manajemen kinerja (Area Akuntabilitas Kinerja)	Terlaksananya: 1. User Acceptance Testing pada seluruh aplikasi 2. Terimplementasinya ke server pre production untuk melalui Web Application Firewall (WAF) Test 3. Terpublikasinya 3 aplikasi tersebut di domain LKPP	Januari-Desember	Inspektur	1	Rapat Pembahasan Implementasi Aplikasi Inspektorat dengan Bag. SI BHSIK	Januari	Notulen Rapat dan Nota Dinas
								2	Testing Internal Aplikasi Inspektorat	Maret	Hasil Identifikasi kekurangan Aplikasi Inspektorat
								3	Rapat Lanjutan Pembahasan Implementasi Aplikasi Inspektorat dengan Bag. SI BHSIK	April	Notulen Rapat
9	Pengelolaan Sumber Daya Manusia: - Belum memiliki kombinasi keahlian dan jenjang jabatan auditor yang diperlukan - Belum memiliki sistem pengembangan karir dengan membandingkan kinerja auditor dengan kinerja yang diharapkan.	Membuat dan mengembangkan sistem pengembangan karir/pola karir auditor.	10 Diklat	Meningkatkan Kualitas dan kompetensi SDM Inspektorat (Area Penguatan SDM ASN)	Jumlah Diklat yang diikuti oleh SDM di Inspektorat tahun 2018 sebanyak 5 diklat dan di tahun 2019 sebanyak 10 diklat.	Maret-November	Inspektur	1	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) dan Wisuda lulusan QIA dan CPIA (Palembang)	April	Laporan kegiatan/sertifikat
								2	Diklat Qualified Internal Auditor	Maret-Agustus	Laporan kegiatan/sertifikat
								3	Diklat Auditor Madya	Maret-April	Laporan kegiatan/sertifikat
								4	Audit Berbasis Risiko	Juni	Laporan kegiatan/sertifikat
								5	Penyenggaraan SPIP Integratif	September	Laporan kegiatan/sertifikat
								6	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Oktober-November	Laporan kegiatan/sertifikat
10	Belum dikembangkan sistem dan prosedur untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern serta kesesuaian dengan standar	banyaknya pengaduan yang tidak ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan (Area Peningkatan Pelayanan Publik)	Jumlah surat tugas sama dengan jumlah Laporan pengaduan	Januari -Desember	Inspektur	1	Telaahan internal atas pengaduan yang masuk ke Inspektorat	Januari -Desember	Notulen/hasil telaahan
								2	Penyusunan Surat Tugas	Januari -Desember	Surat Tugas
								3	Konfirmasi terhadap terlapor atas pengaduan yang masuk	Januari -Desember	BAP
								4	Konfirmasi terhadap pelapor atas pengaduan yang masuk	Januari -Desember	BAP
								5	Penyusunan laporan	Januari -Desember	Laporan Pengaduan (rahasia)
								6	Penyampaian Laporan ke pihak yang berkepentingan	Januari -Desember	Nota Dinas

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
11	Struktur organisasi Inspektorat yang sudah tidak menunjang visi misi LKPP 2020-2024 serta berkembangnya fungsi pengawasan APIP sebagai konsultan, Quality Assurance, Early Warning System	Mengedepankan strategy partner tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin	Reorganisasi Inspektorat	Restrukturisasi Organisasi Inspektorat LKPP (Area Penguatan Kelembagaan)	Perubahan stuktur organisasi Inspektorat sesuai dengan analisa beban kerja	Januari-Maret		1	Penyusunan PKPT Inspektorat beserta perhitungan jumlah hari pengawasan (ABK)	Januari	PKPT Inspektorat 2019
								2	Pembahasan internal usulan restrukturisasi organisasi Inspektorat	Februari	Draft usulan restrukturisasi organisasi Inspektorat
								3	penyampaian Usulan restrukturisasi organisasi Inspektorat ke BPOT	Maret	Nota Dinas

Mengetahui  
Kepala LKPP

Roni Dwi Susanto

Jakarta, 28 Mei 2019

Menyetujui  
Inspektur

Jhon Piter H. Situmorang